

**ANALISIS PENGAWASAN INTERN DALAM PENYALURAN KREDIT  
USAHA TANI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
CABANG SOPPENG**

**YULYASRI WINARDI.S  
105730458013**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**  
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No.259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Analisis Pengawasan Intern Dalam Penyaluran Kredit Usaha Tani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Soppeng

Nama Mahasiswa : YULYASRI WINARDI. S  
No. Stambuk : 105730458013  
Jurusan : AKUNTANSI  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

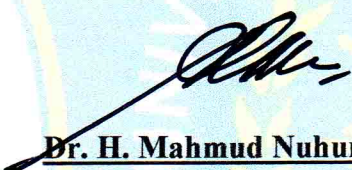
Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Selasa, 03 Juli 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

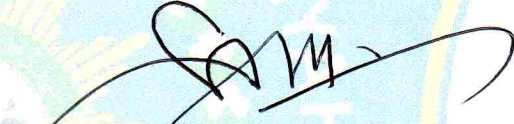
Makassar, Juli 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.  
KTAM. 497794


  
Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak. CA  
NIDN. 0931126607

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan Akuntansi,

  
Ismail Rosuliong, SE., MM.  
NBM. 903078

  
Ismail Badollahi SE., M.Si., Ak. CA  
NBM. 107 3428

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **YULYASRI WINARDI. S, Stambuk. 105730458013** ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: /Tahun 1439H/2018M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Selasa Tanggal 03 Juli 2018, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

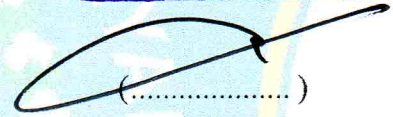
Makassar, 19 Syawal 1439 H  
03 Juli 2018 M

### Panitia Ujian:

1. Pengawasan Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar)

  
(.....)


2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

  
(.....)

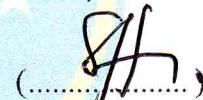
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., SE., MM  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

  
(.....)

4. Penguji : Dr. Muryani Aرسال, SE., MM., Ak.CA

  
(.....)

Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA

  
(.....)

Ismail Rasulong, SE., MM

  
(.....)

Samsul Risal, SE., MM

  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULYASRI WINARDI. S  
Stambuk : 105730458013  
Jurusan : AKUNTANSI  
Judul : Analisis Pengawasan Intern Dalam Penyaluran Kredit  
Usaha Tani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang  
Soppeng

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan didepan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapapun**

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 Juli 2018

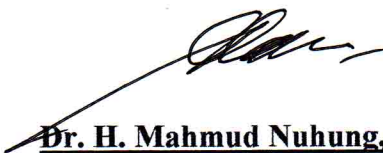
3 Membuat Pernyataan,



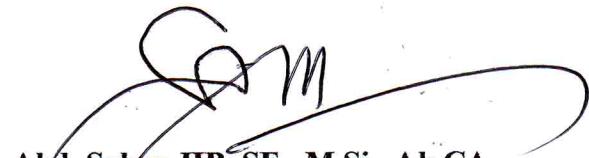
**YULYASRI WINARDI. S**

Diketahui oleh

Pembimbing I,

  
**Dr. H. Mahmud Nuhung, MA**  
KTAM. 497794

Pembimbing II,

  
**Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA**  
NIDN. 0931126607

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGAWASAN INTERN TERHADAP PENYALURAN KREDIT USAHA TANI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SOPPENG**

**YULYASRI WINARDI. S  
105730458013**

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengamati realisasi dari penyaluran kredit usaha tani Pada Bank BRI kantor Cabang Soppeng. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng dengan pengambilan data yang diambil dari Bank BRI Kantor Cabang Soppeng. Data tersebut kemudian di olah menggunakan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif di sajikan dalam bentuk bagan dan tabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian penyaluran kredit usaha tani pada Bank BRI kantor Cabang Soppeng menunjukkan peningkatan yang sangat baik, namun sosialisasi mengenai pembiayaan KUT kepada petani di daerah pedalaman masih sangat kurang, sehingga masih banyak petani yang kurang paham dengan pembiayaan yang di programkan Pemerintah sejak Tahun 2007.

## **ABSTRACT**

### **DISTRIBUTION OF BUSINESS CROPS TANI AT PT. BANK RAKYAT INDONESIA BRANCH SOPPENG**

**YULYASRI WINARDI. S  
105730458013**

ABSTRACT The objective of this research in to observe the realization of channelling KUT Agriculture at Bank BRI Soppeng Branch Offices. The research was conducted with data collecting taken from Bank BRI Soppeng Branch Offices. The data is processed qualitative research methods presented in the form of charts and tables. The Research result indicate that the study of KUT Agricultural field at Bank BRI Soppeng Branch Offices showed excellent improvement, but the socialization of KUT financing to farmers in rural areas is still lacking, so there are many farmers who are less familiar with the financing programmed government since 2007.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur yang teramat dalam atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, salawat dan salam tetap terpanjatkan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Judul “Analisis Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Tani pada PT. Bank BRI Cabang Soppeng”.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini telah menyita banyak waktu, tenaga, curahan pikiran serta materi. Tanpa bantuan teman maupun dosen ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibunda Tercinta .
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Serta Para Pembantu Dekan yang telah memberikan kemudahan dalam rangka penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Ishak, SE., M.Si., Ak. selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan kelancaran selama proses Perkuliahan.
4. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A. sebagai pembimbing I yang dengan tulus memberikan nasehat, bimbingan, saran, serta petunjuk selama penulis melakukan penyusunan dan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Abdul Salam, SE., M.Si., Ak., CA. sebagai pembimbing II, yang dengan tulus dan sabar bersedia meluangkan waktunya serta petunjuk dan bimbingannya selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai pada penyusunan dan penulisan Proposal ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh pegawai/Staf Fakultas Ekonomi, yang selalu memberikan bimbingan dalam kelancaran kegiatan perkuliahan dan akademik.
8. Seluruh pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar dan sekitarnya, yang telah memberikan kesempatan, bantuan dan arahan kepada penulis selama pengumpulan data dan referensi dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Yang Sangat Teristimewa buat Ibunda Hj. Salmare dan kakanda Wahyu yang selalu memberikan perhatian, Pengorbanan, kasih sayang, motivasi, dan do'a yang tulus dan tiada henti-hentinya serta segalanya dalam hidup ini.
10. Saudariku, Astri Nirmala Sari atas Semangat dan Motivasi serta bantuannya baik berupa moril maupun dari materi..
11. Sahabat seperjuangan di kampus Irham, AAN, Fajri, Syech, Imam dan Seluruh teman-temanku di AK. 2 13 yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang senantiasa memberikan Do'a, dukungan, dan semangat selama ini. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan berkumpul kembali, serta memberikan kesuksesan bagi kita semua. Semoga tali



persaudaraan itu tak pernah putus, walau tangan tak bergandengan namun selalu ada di hati.

Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Dan akhirnya, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

***Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.***

Makassar, Januari 2018

Yulyasri Winardi. S

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Fungsi Bank .....	5
B. Pengertian dan Jenis-jenis Kredit.....	8
C. Pengertian Pengawasan.....	12
D. Pengertian Pengawasan Intern.....	14
E. Fungsi Pengawasan Intern.....	16
F. Unsur-unsur Pengawasan Intern.....	17
G. Pengertian Efektifitas.....	20
H. Pengertian Kredit Usaha Tani (KUT).....	21
I. Ketentuan – ketentuan Kredit Usaha Tani .....	22
J. Penelitian Terdahulu .....	23
K. Kerangka pikir .....	24
L. Hipotesis.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
B. Metode Pengumpulan Data.....	27
C. Jenis dan Sumber Data.....	28

D. Defenisi Operasional.....	29
E. Metode Analisis.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Sejarah Singkat Berdirinya .....	31
B. Struktur Organisasi .....	35
C. Uraian Tugas dari Masing-Masing Job .....	36
BAB V HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Usaha Perkreditan BRI Cabang Soppeng .....	42
B. Sistem dan Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Tani.....	47
C. Sistem pengawasan Intern Penyaluran Kredit Usaha Tani di BRI Cabang Soppeng .....	51
D. Standar Operasional Prosedur BRI Cabang Soppeng .....	59
E. Analisa Pembahasan .....	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	25
Gambar 5.1 Flowchart Penyaluran Kredit .....	54
Gambar 5.2 Siklus Unsur SPI ( Sistem Pengendalian Intern).....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Jumlah Pembiayaan Unit BRI Soppeng Pada KUR-Mikro dan KKP-E.....	44
Tabel 5.2	Jumlah Kredit Usaha Tani (KUT) Yang Disalurkan Untuk Periode Tahun 2012 – 2016 .....	46
Tabel 5.3	Pelunasan Kredit Usaha Tani (KUT) dan Jumlah Nasabah.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah memberdayakan peranan jasa perbankan. Peranan jasa perbankan sebagai lembaga keuangan yaitu menghimpun dana masyarakat, selanjutnya sebagai sumber usaha bagi pembiayaan dunia usaha, yang sangat penting dalam menunjang dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

Bank sebagai suatu unit usaha dalam menjalankan fungsinya, mengembang dua fungsi yang saling berkaitan yaitu: Fungsi sebagai pelaksana pembangunan dan fungsi komersil yang berusaha mendapat keuntungan untuk perkembangan dan kelangsungan usahanya. Untuk menjalankan fungsinya, khususnya fungsi komersil dengan kegiatan operasional di bidang perkreditan dan memberikan arah serta pedoman bagi bank dalam pelaksanaan operasi perkreditan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal pengembangan usaha kecil merupakan suatu hal yang kompleks dan mencakup banyak faktor antara lain faktor ekonomi, social cultural, politik, dan faktor lainnya. Oleh karena itu upaya pengembangan usaha kecil harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait secara terkoordinasi dan bersama-sama melalui berbagai program yang komprehensif dan konseptual.

Upaya pemerataan penempatan bidang usaha, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa fasilitas kredit usaha tani yang disalurkan

Bank-Bank pemerintah. Kelayakan penyaluran kredit usaha tani merupakan kegiatan operasional yang sangat menunjang perkembangan lebih lanjut dari suatu bank. Untuk menunjang serta menjamin kelancaran suatu penyaluran kredit usaha tani yang sehat diperlukan adanya prosedur yaitu pengawasan intern sebagai salah satu fungsi manajemen yang dihasilkan secara otomatis melalui suatu prosedur tertentu, prosedur yang dimaksud adalah urutan-urutan pelaksanaan yang harus diteliti oleh seseorang dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Tujuan akhir dari Bank adalah mengusahakan kelangsungan hidup pengusaha kecil melalui usaha-usaha perbankan yang sehat dan pencapaian keuntungan secara wajar. Artinya dalam operasional suatu Bank (perusahaan) haruslah berusaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan tujuan yang utama pula adalah turut serta dalam membangun dan mengembangkan perekonomian nasional, utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah melalui pemberian pembiayaan yang selayaknya.

Di tengah kondisi lesunya kegiatan perekonomian dan persaingan yang beragam ini, PT Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu *agent of development* yang berfungsi sebagai lembaga intermediary yang menyalurkan kredit, harus mampu menawarkan produk yang inovatif dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian bank (*Prudential banking*). Hal ini dilakukan agar dapat menghindari resiko terjadi kredit macet terlebih lagi pada kredit yang bersekala besar.

Salah satu faktor penting untuk mengawasi kelancaran penyaluran kredit serta untuk mengurangi tingkat resiko kredit maka PT Bank Rakyat Indonesia (Perrsero) Cabang Soppeng perlu melakukan pengawasan intern atas kredit yang telah disalurkan.

Berdasarkan uraian diatas, sehingga penulis memilih judul “ Analisis Pengawasan Intern dalam Penyaluran Kredit Usaha Tani Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Soppeng.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah pokok yang dikemukakan adalah :

1. Apakah pengawasan intern terhadap penyaluran kredit usaha tani, telah dilakukan secara efektif oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian yaitu :

1. Untuk menjelaskan penggunaan model attribute sampling dan pengujian kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern penyaluran kredit.
2. Untuk mengetahui efektifitas pengawasan intern terhadap penyaluran kredit usaha tani pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan masukan kepada Bank Rakyat Indonesia, khususnya mengenai pengawasan intern terhadap penyaluran kredit usaha tani.
2. Sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa dan pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang topik dan masalah yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Fungsi Bank**

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 Tahun 1992, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Melayu Hasibuan (2001:1) menerangkan bahwa "bank merupakan lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (Financial Asset) serta bermotifkan profit dan juga sosial yang bukan hanya mencari keuntungan saja".

Menurut Dendawijaya (2001:25) Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (Financial Intermediaries) yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelibihan dana

kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (Deficit Unit) pada waktu yang di tentukan.

Dari beberapa pengertian bank yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bank adalah suatu lembaga yang berniaga uang yang peranannya maupun fungsinya dalam masyarakat sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat sebagai lembaga perkreditan dan sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang, dan untuk melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat.

Untuk mengetahui lebih jauh peranan yang dapat dilakukan oleh suatu bank dapat disimak dari definisi bank tersebut. Suatu bank dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan tiga fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

a. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana

Dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari, bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak diluar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah, diperoleh bank antara lain apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan

dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Dana dari bank Indonesia diperoleh dari bank, antara lain apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan kredit-kredit kepada usaha-usaha yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan, misalnya kredit usaha tani(KUT), kredit pengadaan pangan, dan sebagainya.

b. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana

Dana yang dihimpun oleh bank tersebut harus disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (intermediare) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi biaya operasional. Dengan demikian bank harus mampu menempatkan dana tersebut dalam bentuk penempatan yang paling menguntungkan.

c. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Fungsi bank dalam melancarkan pembayaran transaksi perdagangan dapat terlaksana karena bank mempunyai jasa-jasa bank. Jasa-jasa tersebut dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah saja atau nasabah dan bank. Jasa yang hanya berkepentingan bagi nasabah saja pada umumnya bank mengenakan biaya/komisi, misalnya jasa pengiriman uang (transfer dana). Dalam permohonan transfer dana, bank tidak

berkepentingan atas transfer tersebut, yang berkepentingan adalah nasabah, agar uang tersebut dapat diterima oleh penerima pada hari yang sama dengan transfer yang dilakukan. Sedangkan jasa bank yang berkaitan dengan kepentingan bank dan nasabah, bank membebaskan dari biaya / komisi, misalnya jasa kliring, penerimaan setoran dan sebagainya.

## **B. Pengertian kredit dan jenis-jenis kredit**

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang berbeda ragam, dimulai dari arti kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Muljono (2001:56) Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggung pada jangka waktu yang disepakati.

Menurut Sinungan (2001:234) Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam prestasi itu akan dikembalikan lagi

pada suatu masa tertentu di masa yang akan datang di sertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Beberapa pendapat tersebut di atas jelaslah bahwa kredit dalam arti ekonomi merupakan penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Terlihat pula bahwa unsur kepercayaan dan unsur waktu merupakan unsur terpenting dalam suatu kredit.

### Jenis-Jenis Kredit

#### **1. Jenis kredit menurut penggunaannya:**

- a. Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri, kredit ini tidak produktif.
- b. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur, kredit ini produktif.
- c. Kredit Investasi adalah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.

#### **2. Menurut Jangka Waktunya :**

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun, pada umumnya kredit ini disalurkan bank ke sektor perdagangan, distribusi dan sektor lainnya.
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu satu sampai tiga tahun, dimana pada umumnya kredit semacam ini di salurkan ke

sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, dan sektor-sektor lainnya.

- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang mempunyai waktu lebih dari tiga tahun dan umumnya kredit semacam ini disalurkan pada sektor-sektor investasi.

### **3. Menurut Collectibility**

Yang dimaksud dengan collectibility kredit adalah keadaan pembayaran pokok pinjaman dan bunga oleh nasabah terlihat pada tata usaha bank. Berdasarkan collectibilitynya, pinjaman dapat digolongkan atas 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Lancar, yaitu pinjaman dan pembayaran pokok dan bunganya berjalan sesuai dengan pinjaman yang bersangkutan, termasuk perubahannya yang disetujui oleh bank.
- b. Kurang lancar, yaitu pinjaman yang pembayaran pokoknya tidak dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang bersangkutan misalnya:
  1. Pinjaman yang telah jatuh tempo tidak diperpanjang akan tetap dan belum melampaui waktu tiga bulan.
  2. Adanya tunggakan pembayaran pokok lewat waktu tiga bulan, dan tunggakan bunga lewat satu bulan dan berdasarkan penilaian bank, debitur dapat melunasi utangnya dan seluruh bunganya.
  3. Khusus pinjaman akses yang jangka waktunya telah lewat dan belum diperpanjang akan tetapi belum melampaui tiga bulan dan berdasarkan penilaian

bank, debitur masih dapat melunasi utangnya dan seluruh bunga.

- c. Diragukan, adalah pinjaman yang telah jatuh tempo dan lewat tiga bulan dan berdasarkan penilaian bank, debitur tidak dapat membayar kembali seluruh hutang dan bunganya, hanya diharapkan pelunasan sekarang. Kurang 50% dari saldo debetnya pinjaman tanpa perjanjian kredit dan tanpa aksep yang berdasarkan penilaian bank diharapkan dapat diperoleh pelunasan sekurang-kurangnya 50% dari saldo debetnya.
- d. Macet, yaitu pinjaman yang tidak dapat dikategorikan dari tiga jenis tersebut diatas, dan menurut penilaian bank, hanya dapat diharapkan pelunasannya kuran dari 50% dari saldo debetnya.
- e. Kredit dalam pengawasan, yaitu sebelum pembelian kredit terlebih dahulu diadakan penilaian atau analisis kredit.

#### **4. Menurut Sifatnya**

- a. Dengan perjanjian kredit, yaitu yang diberikan dengan perjanjian tertulis lebih dahulu yang antara lain penetapan besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka , jaminan dan cara-cara pembayaran kembali dan sebagainya.
- b. Tanpa perjanjian kredit, yaitu kredit yang diberikan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu, dan termasuk dalam golongan ini yaitu:

Overdraft karena penarikan, adalah penarikan pembebanan rekening koran nasabah yang melampaui saldo kredit sehingga mengakibatkan saldo debet pada rekening yang bersangkutan,



sehingga untuk itu tidak ada fasilitas kredit berdasarkan perjanjian tertulis.

Overdraft karena pembenan bunga, yaitu pembebanan bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang, yang menyebabkan pelampauan plafon kredit sebagaimana tercantum dalam perjanjian tertulis.

Kredit yang diberikan yang hanya disertai aksep atau dengan jaminan surat berharga.

### **C. Pengertian Pengawasan**

Menurut Firdaus (2004:190) menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana atau tidak, dengan maksud untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan apabila terlanjur terjadi penyimpangan dapat segera diadakan tindakan koreksi.

Menurut Siagian (1998:258) Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan. Strategi pengawasan perlu diatur, agar dapat mencapai sasaran atau target yang diinginkan, tidak seorang manajer yang dapat melaksanakan pengawasan jika belum membuat atau menyusun rencana dengan baik. Pengawasan yang baik sangat memungkinkan seorang manajer dapat mengalami bahwa segala

aktivitas organisasi dapat dilakukan baik jika tidak didukung oleh rencana yang baik.

Uraian diatas menggambarkan, bahwa yang perlu di perhatikan dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah kegiatan meneliti apakah roda organisasi dapat berjalan atau dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditetapkan .

Pengawasan dapat dilakukan sesuai perintah dan prinsip yang ditetapkan. Manakala dalam pengawasan ditemukan banyak kekeliruan atau kesalahan, diperbaiki dan berusaha mencegah terulangnya kembali, ini berarti orientasi pengawasan meliputi benda dan manusia.

Sistem dan tehnik dalam pengawasan harus menggambarkan penyesuaian rencana, sebagai pedoman yang menentukan arah yang selalu dikaitkan dengan kedudukan atau jabatan dari seseorang yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut, ini berarti ruang lingkup pengawasan harus dibedakan menurut pola dan susunan organisasi perusahaan, yang merupakan untuk menjelaskan peranan seseorang dalam perusahaan tersebut, dimana harus bertanggung jawab atas pengawasan yang dilaksanakannya.

Manajemen sebenarnya terdiri dari unsur-unsur yang subyektif, yang sering menjadikan kegiatan pengawasan semakin jauh dari tujuan. Hal demikian inilah harus dihindari jika seorang manajer menginginkan perusahaannya beroperasi dengan baik adalah bersifat obyektif jika seorang manajer menerapkan prinsip-prinsip pengawasan demi kepentingan perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan dengan efektif, selain menghindari kegagalan dalam pelaksanaan rencana, rencana itu juga hendaknya tidak kaku, artinya dalam pengawasan perlu diperhatikan fleksibilitasnya agar memudahkan melakukan perubahan-perubahan yang perlu sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menghindari atau memperkecil kerugian atau resiko yang mungkin terjadi, karena sejak beroperasi suatu perusahaan selalu di hadapkan dengan berbagai resiko.

#### **D. Pengertian pengawasan intern**

Menurut Mujono (1999: 28) menyatakan bahwa pengawasan intern meliputi susunan organisasi dan semua cara-cara dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau perusahaan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kebenaran data administrasi, memajukan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh top management.

Berkembangnya dunia usaha dan semakin kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi oleh para ahli untuk mengadakan penyempurnaan dan perluasan wawasan pengawasan intern yang masih perlu ditambahkan mengenai aspek-spek perlindungan harta milik perusahaan dalam sistem pengawasan. Jadi pengertian pengawasan intern dan cek ialah meliputi pengecekan dan pengendalian intern.

Pengawasan intren ini semakin lama semakin dikenal sebagai sarana pengawasan yang penting dan menarik perhatian kalangan pengusaha serta para ahli akuntan dimana perkembangan seperti ini mengundang para ahli yang berkecimpung dalam bidang akuntansi dan manajemen untuk mengadakan penyempurnaan dalam perumusan peran serta pengertian pengawasan intern tersebut.

Menurut Bastian (2003:203) pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Menurut Tisnawati (2005:328) menyatakan bahwa pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan terhadapnya.

Pengertian pengawasan intern dalam arti luas adalah meliputi hal-hal yang berhubungan langsung dengan fungsi-fungsi dari Deprtemen Akuntansi dan Keuangan, seperti dalam hal pengawasan sistem anggaran, biaya-biaya standar, laporan operasional secara berkala, analisa statistik, program latihan untuk membantu pegawai agar dapat mengerti dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, adanya staf pemeriksa intern yang memberi keyakinan bagi manajemen mengenai prosedur yang telah ditetapkan, apakah sudah cukup atau sudah dilaksanakan dengan baik.

Sebenarnya pengawasan intern juga mempunyai peranan dalam bidang lain yang meliputi kegiatan penelitian, waktu dan gerak yang

merupakan bidang teknis serta penggunaan mutu melalui sistem pemeriksaan yang pada dasarnya adalah merupakan fungsi produk.

#### **E. Fungsi Pengawasan Intern**

Baridwan (1998:52) mengatakan bahwa fungsi pengawasan intern (internal control) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi.
2. Untuk penentuan batas-batas mutlak suatu pekerjaan mana yang harus dikerjakan dan mana merupakan pelanggaran. Hal ini nampak dalam penggunaan budget dan standar kerja.
3. Memberi keyakinan terhadap catatan-catatan keuangan dan transaksi,
4. Mewujudkan keadaan-keadaan yang luar biasa, ini nampak dalam pembuatan laporan bilamana terjadi kecurangan dan penyimpangan dan standar kerja yang dapat diketahui.
5. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan operasional supaya berjalan lancar, efektif, dan efisien.
6. Membantu manajemen dalam memberi penilaian atau hasil pelaksanaan operasional, membuat peramalan atau dugaan serta membantu dalam hal pengambilan keputusan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi internal control sangat luas, baik administratif maupun akuntansi, tetapi bukan berarti tidak ada lagi peluang bagi orang-orang tertentu pada suatu organisasi untuk melakukan kecurangan atau penyelewengan serta kesalahan-kesalahan. Dengan adanya

internal control pelaksanaan kegiatan penyelewengan dan kecurangan-kecurangan serta kesalahan-kesalahan yang merugikan, namun demikian, semuanya tergantung pada kemampuan dan kesanggupan dari pelaksanaannya.

#### **F. Unsur-Unsur Pengawasan Intern**

Internal control merupakan suatu sarana maka harus mencakup unsur-unsur pokok. Mengenai unsur ini ada beberapa literatur perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Muljono(1999:29) ada empat unsur internal control yaitu:

1. Suatu struktur organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan fungsional secara tepat.
2. Terdapat sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak agar tercapai accounting control yang cukup atas aktiva, utang-utang, pendapatan dan biaya.
3. Adanya kebiasaan praktek-praktek yang sehat yang harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian organisasi.
4. Adanya pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawabnya.

Unsur-unsur di atas masing-masing sama pentingnya dan merupakan dasar tiap sistem internal control yang baik, sehingga kelemahan yang serius diantara salah satu unsur di atas akan menghambat suksesnya seluruh sistem internal control yang ada.

Menurut Bastian (2002:204) mengemukakan empat unsur internal control yaitu :

## 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip, harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan tersebut. Satu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

## 2. Sistem Wewenang dan Prosedur

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya yang tinggi (reliability). Dengan demikian, sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses

akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

### 3. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak diatur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengawasan intern yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa intern. Adanya satuan pengawas internal dalam perusahaan akan menjamin efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin ketelitian dan keandalannya.

### 4. Pegawai yang mutunya sama dengan tanggung jawab

Internal control dapat berfungsi dengan baik, tidak hanya tergantung pada rencana organisasi yang efektif atau sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang baik serta praktek yang sehat, tetapi selain dari pada itu, juga tergantung kepada tingkat kecakapan dari pegawai pada suatu tingkat



jabatan, perlu diperhatikan serta dipertimbangkan masalah pengalaman. Kemampuan dan pendidikan agar dapat dipergunakan dengan efektif.

Untuk mendapatkan pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh, antara lain:

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
- b. Mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.
- c. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompetensi seperti yang dituntut oleh jabatan yang akan didudukinya.
- d. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

### **G. Pengertian Efektifitas**

Menurut Handoko (1999:7) menyatakan bahwa efektifitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2001:147) menyatakan bahwa efektifitas adalah pelaksanaan rencana yang memerlukan pengendalian agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jadi efektifitas adalah suatu kegiatan terbaik antara usaha dengan hasilnya, antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan.

1. Hasil maksudnya adalah suatu pekerjaan dapat disebut efektif kalau dengan usaha tertentu dapat memberikan hasil yang maksimal mengenai mutu atau jumlah satuan hasil atau dengan kata lain terjamin kualitas dan kuantitasnya.
2. Usaha maksudnya adalah suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika suatu hasil tertentu tercapai pada suatu tujuan.

Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya adalah efektif, jadi kalau tujuan atau sasaran tidak tercapai dan tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.

#### **H. Pengertian Kredit Usaha Tani (KUT)**

Tujuan dikeluarkannya kredit usaha tani yaitu untuk membantu petani dalam rangka meningkatkan produksi pangan khususnya padi dan palawija, dan pendapatan serta kesejahteraan petani yang bersangkutan, disamping itu untuk memobilisasi dana masyarakat dalam upaya menunjang pembentukan dana pembangunan dari masyarakat, juga menciptakan pemerataan kesempatan untuk memperoleh fasilitas jasa perbankan ditingkat pedesaan.

Menurut Afif (1999:93) menyatakan bahwa kredit usaha tani adalah merupakan kredit modal kerja yang diperuntukkan kepada petani guna membelanjai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi/palawija.

Menurut Sulistyawardhani (2000:47) kredit usaha tani adalah kredit untuk menutup biaya penggarapan lahan, pembelian bibit padi, pembelian

peralatan pertanian, dan penyewaan atau pembelian sawah dan ternak dan sebagainya yang berkaitan dengan usaha tani.

### **I. Ketentuan-Ketentuan Kredit Usaha Tani (KUT)**

1. *Character* yaitu watak dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan dalam pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu bersedia dan berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
2. *Capacity* (Kemampuan) yaitu pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.
3. *Capital* (Modal) yaitu Modal ini menuangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah capital yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat debt to equity ratio (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.
4. *Collateral* (Jaminan) yaitu jaminan atau agunan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai ayunan andaikata terjadi

ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

5. *Condition of oconomy* (Kondisi Ekonomi) yaitu kondisi atau situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasamendatang.

#### **J. Penelitian Terdahulu**

Mulyadi (2010), Analisis pengawasan intern dalam penyaluran kredit menyimpulkan bahwa pihak pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya melakukan pencegahan dan resiko-resiko yang bisa mengakibatkan adanya kredit macet dengan cara turun tangan sendiri untuk survey kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur.

Kristono (2013), Analisis pengawasan intern dalam penyaluran kredit menyimpulkan bahwa prosedur pengendalian internal dalam pemberian kredit telah memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip 5C dengan cukup baik sebelum dicairkannya suatu kredit.

Beasley, Alvin, Elder dan Jusuf (2011), analisis pengawasan intern dalam penyaluran kredit menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pada USP. Swamitra Rambah ini belum berjalan dengan baik, ini terlihat dari adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh karyawan dan manajer Swamitra yang terkadang masih ikut untuk menagih kredit kepada debitur.

Suhardjono (2002), analisis pengawasan intern dalam penyaluran kredit menyimpulkan bahwa surat perjanjian kredit yang digunakan PD BPR Bank Kabupaten Boyolali ternyata tidak bernomor urut cetak, namun bernomor urut tulisan manual (tulisan tangan). Walaupun selama proses penelitian, peneliti menemukan bahwa semua transaksi pemberian kredit ternyata terdapat dokumen sumber (surat perjanjian kredit) dan dokumen pendukungnya namun alangkah lebih baiknya jika surat perjanjian kredit tersebut bernomor urut tercetak.

Manama (2010), analisis pengawasan intern dalam penyaluran kredit menyimpulkan bahwa sistem pemberian kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Tulungagung telah dilaksanakan secara efektif, hal itu dapat dilihat dari proses pelaksanaan kredit yang sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan. Dengan melaksanakan prosedur yang berlaku, secara tidak langsung pihak bank telah menerapkan sistem pengendalian intern atas kredit yang diberikan. Prosedur tersebut meliputi: prosedur permohonan kredit, pemeriksaan data dan analisa kredit, tahap keputusan kredit, perikatan, realisasi kredit, dan pengawasan.

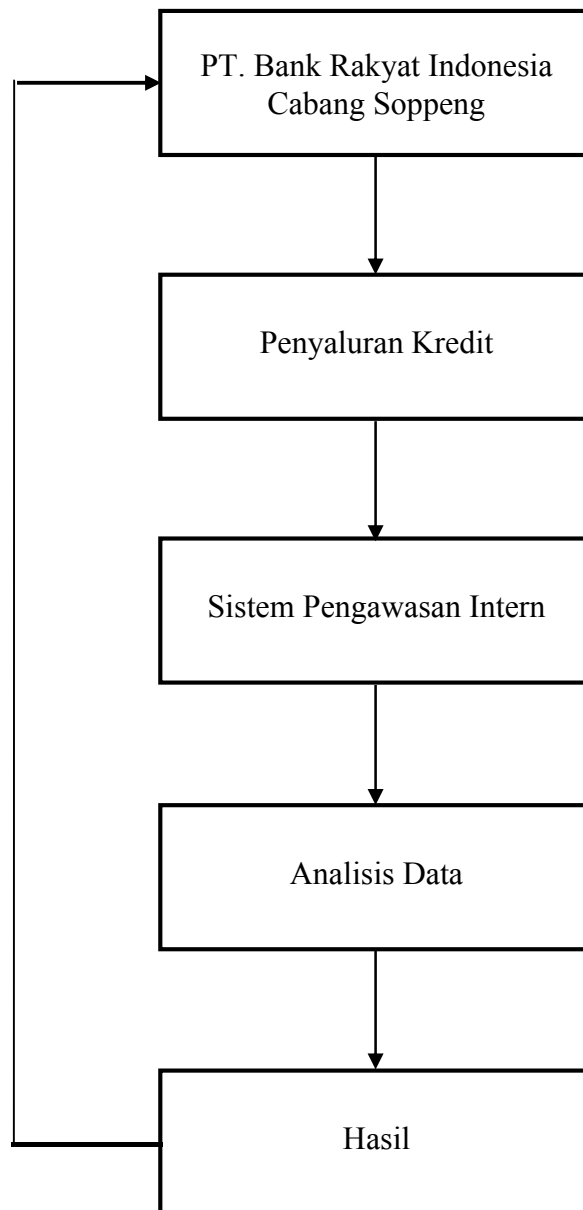
## **K. Kerangka Pikir**

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Soppeng merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman bagi pengusaha kecil dan mengevaluasi sejauh mana penggunaankredit yang telah

Pengawasan intern terhadap penyaluran Kredit Usaha Tani Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng, diketahui dengan menjelaskan

kebijaksanaan pengawasan kredit yang bersangkutan. Sedangkan, efektifitas Pengawasan Terhadap Penyaluran Kredit, dapat diketahui dengan membandingkan penyaluran kredit disalurkan

Adapun kerangka pikir yang telah diuraikan dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## **L.Hipotesis**

Berdasarkan masalah pokok dan tujuan penelitian yang diajukan, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

”Di duga, bahwa pengawasan intern terhadap penyaluran kredit usaha tani, telah di lakukan secara efektif oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng dan pengawasan intern terhadap penyaluran kredit usaha tani, telah dilakukan secara efektif oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Daerah penelitian dilaksanakan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Soppeng, pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Soppeng, sedangkan waktu penelitian sampai dengan penyusunan laporan diperkirakan kurang lebih 2(dua) bulan yaitu bulan april sampai bulan mei 2017.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Dalam proses pengumpulan data, maka penulis mengadakan studi kasus dan pengumpulan data melalui penelitian lapang (field research) dan penelitian pustaka (library research), sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka( *library research* ) ,yaitu penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan teori tentang pembiayaan atau penyaluran kredit kepada pengusaha ekonomi lemah
2. Penelitian lapang ( *field research* ), yaitu kegiatan penelitian lapangan, dimana penulis mencari data yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data penulis melakukan pengamatan setempat dan wawancara langsung dengan pimpinan serta beberapa karyawan PT. Bank Rakyat



Indonesia Tbk Cabang Soppeng dan mengumpulkan data berupa laporan-laporan yang disajikan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Untuk perbandingan hal tersebut maka penulis mengadakan :

a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dalam proses kegiatan penyaluran kredit kepada pengusaha ekonomi lemah.

b. Wawancara

Teknik interview dilakukan dengan jalan wawancara secara langsung dengan pimpinan, kepala bagian pembukuan dan keuangan atau sejumlah personil yang berhubungan dengan penulisan proposal ini yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Soppeng.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan tentang kebijaksanaan pengawasan intern.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari bank dalam bentuk jumlah penyaluran kredit usaha tani.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng, meliputi data yang diperoleh melalui

wawancara dengan pimpinan dan karyawan bank serta data tentang kebijaksanaan pengawasan intern.

- b. Data sekunder yaitu data lain yang diperoleh sehubungan dengan penulisan proposal ini yaitu berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala, seperti jumlah penyaluran kredit usaha tani.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian, maka perlu diberikan definisi mengenai variabel – variabel yang diteliti, sebagai berikut :

1. Efektifitas adalah pelaksanaan rencana yang memerlukan pengendalian agar dapat mencapai sasaran yang telah di tetapkan.
2. Pengawasan Intern adalah meliputi susunan organisasi dan semua cara-cara dan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga atau mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kebenaran dan administrasi, memajukan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

## E. Metode Analisis

Untuk menguji dan membuktikan hipotesis maka penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif yaitu menjelaskan pengawasan intern terhadap penyaluran kredit usaha tani.
2. Analisis kuantitatif sistematis pengawasan intern terhadap penyaluran kredit usaha tani.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \times 100\%$$

Artinya, pemberian kredit dikatakan efektif apabila jumlah output aktual lebih besar atau sama dengan output target.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Singkat Berdirinya

Pada akhir abad XIX, tepatnya pada tanggal 16 Desember 1895 R. Wira Admaja dan kawan-kawannya mendirikan “*Depurwokwrtosce Hulp-en Spear Bank Inlandesche Hoofden*” (Bank penolong dan tabungan bagi priyayi purwokerta), dengan akte otentik yang dibuat oleh E. Siebrug kemudian mendirikan “*Depurwokwrtosce Hulp Spaer en Landbowchrediet Bank*” sebagai kelanjutan dari Depurwokwrtosce Hulp-en Spear Bank Inlandesche Hoofden.

Pada 1898 atas bantuan dari pemerintah Hindia Belanda mereka mendirikan Volkbanken atau disebut juga Bank Rakyat Indonesia yang daerah kerjanya meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten atau afdeling yang dinamakan juga afdelingbanken. Pada abad XX Volbanken mengalami kesulitan sehingga pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dalam perkreditan rakyat, dan sejak 1904, mendirikan Dients den volkecredietwessen (Dinas perkreditan rakyat) yang bertugas membantu volbanken dengan memberikan tambahan modal, bimbingan, pembinaan dan pengawasan sehingga perkreditan rakyat mulai 1904 menjadi regeriezrog (tugas pemerintah). Pada 1912 pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga yang berbadan hukum dengan nama *central cash* yang berfungsi sebagai *Bank Sentral Volkbanken* paa umumnya termasuk juga bank desa.

Sebagai akibat dari resesi dunia pada 1912-1932 *volbanken* tidak mampu berjalan dengan baik dalam mengatasi kesulitannya. Pada 1934 dengan stabil

1932-1982 *Algemene Volksbanken Bank* (AVB) yang berbadan hukum Eropa didirikan dengan modal kerja pertama berasal dari hasil *liquiditas Central Cash* ditambah dengan kekayaan bersih dari *volkbanken* itu. dengan demikian maka *Algemenevolkscrediet bank* merupakan kelanjutan *Cenaral Cash* yang menjadi integritas dari *volkbanken*.

Pada zaman pendudukan Jepang AVB di pulau Jawa diganti namanya menjadi *Ayoomin Ginko* (Bank Negara Indonesia) berdasarkan undang-undang No. 39 tahun 1942. Setelah Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dengan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1935, maka pemerintah menetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia yang bernama **Algemene Volkcrediet Bank (AVB)** yang kemudian menjadi Syoomin GINKO. sementara NICA (*Nederlands Indies Cipil Administration*) di Jakarta mendirikan kembali kantor besar *Algemene volkcrediet Bank*.

Pada 1948 setelah Ibukota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta diduduki oleh Belanda maka kantor besar Bank Rakyat Indonesia dihapuskan oleh Belanda ( NICA ) dan kemudian direksinya dipenjarakan karena tidak mau bekerjasama dengan *Algemene Volkcrediet Bank*. Sejak itu kegiatan Bank Rakyat Indonesia berhenti untuk sementara.

Sebagian akibat dari persetujuan Roem-Royen maka kantor besar BRI hidup kembali namun wilayah kerjanya hanya meliputi daerah yang dikembalikan pada Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yaitu daerah Rendville sedangkan di daerah yang lainnya bernama *Algemene Volkcrediet Bank* diganti menjadi BARIS (Bank Rakyat Indonesia Serikat).

Perkembangan sejarah politik Indonesia ternyata membawa pengaruh sangat besar bagi perkembangan BRI dengan surat keputusan Menteri Kemakmuran RIS tanggal 16 Maret 1959 direksi BRI dari Rakyat bagian Republik Indonesia dipindahkan dari Jogjakarta ke Jakarta untuk dijadikan direksi BARIS, tetapi surat keputusan itu mendapat protes dari federasi, sebab kantor besar BARIS belum merupakan realita sehingga Menteri Kemakmuran RIS meralatnya dengan menamakan direksi BARIS itu menjadi direksi AVB / BRI. Walaupun pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara RIS dengan UUD 1950 Negara Republik Indonesia dijadikan sebagai Negara kesatuan akan tetapi Volkscrediet Bank baru dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1951 berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1951. Selain itu peraturan pemerintah No. 25 tahun 1951 menegaskan bahwa 20 April 1951 dijadikan sebagai Bank penengah.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden untuk kembali kepada Undang-Undang 1945, maka dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ( PERPU ) No. 14 tahun 1960 pada tanggal 28 Oktober 1960 Lembaran Negara 128 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang disingkat dengan BKTN, dalam bank mana seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan.

1. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PERPU No. 42 tahun 1960, 26 Oktober 1960.
2. Bank Tani dan Nelayan berdasarkan PERPU No. 43 tahun 1960, 26 Oktober 1960.
3. Nederlandsche Hende Mij (NHM) setelah dinasionalisasikan berdasarkan PERPU No. 26.1206 BUM II 30 November 1960 diserahkan kepada Bank

koperasi, Tani dan Nelayan.

Belum sampai integritas ketiga bank pemerintah ini terlaksana, semua bank rakyat dan bank tabungan pos berdasarkan Penpres No. 8 tahun 1965, 24 Juni 1965 dijadikan satu dengan Bank Indonesia, Kemudian kebijaksanaan pemerintah tentang terciptanya bank tunggal. BKTN (Bank Koperasi, Tani dan Nelayan ) diintegrasikan kedalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan nelayan berdasarkan Penpres No. 9 tahun 1965 dan surat Menteri Bank Sentral No. 42 tahun 1965. Pada waktu itu Panpres baru berjalan satu bulan, lalu dikeluarkan Panpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Rakyat Indonesia dimana Bank Indonesia Urusan Tani dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Rakyat Indonesia Unit II dan selanjutnya Bank Rakyat Indonesia Unit II bidang Rural sedangkan bekas NHM bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia II bidang Eksim.

Pada akhir 1968 berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, Bank Rakyat Indonesia Unit II Bidang Rural dan Eksim diganti menjadi bank-bank milik rakyat dengan nama :

1. Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural dengan undang-undang No. 12 tahun 1968.
2. Bank Ekspor-Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta perlengkapan dan kekayaan Bank Rakyat Indonesia Unit II bidang Eksim dengan undang-undang tahun 1969.

Untuk mengenal sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia maka berdasarkan surat keputusan Direksi BRI Nokep : S. 67 DIR/122/1982 tanggal 2 desember 1982 ditetapkan bahwa hari "jadi Bank Rakyat Indonesia adalah 16 Desember 1895.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi merupakan salah satu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. sehingga struktur Organisasi dibuat secara sederhana, efektif untuk dapat bekerja secara efisien. Selain itu struktur organisasi sering disebut bagan atau skema organisasi dengan ini gambaran skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai tujuan.

Demikian pula halnya dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng personilnya melakukan pekerjaannya masing-masing sesuai dan tanggung jawabnya, dan satu sama lainnya saling berhubungan dalam usaha menciptakan suasana kerja yang disiplin dan dinamis agar tercapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Oleh karena itu suatu organisasi harus dapat menggambarkan secara jelas fungsi dari tiap-tiap bagian yang terdapat pada organisasi tersebut.

Skema struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Soppeng, dapat terlihat bahwa semua tugas perencanaan berada berada dibawah satu tangan. Demikian juga halnya dengan komando, wewenang dan pengawasan.



### **C. Uraian Tugas dari Masing-Masing Job**

Berdasarkan struktur organisasi kantor PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng, diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

#### **1. Pimpinan Cabang**

Tugas dan tanggung jawab

- a. Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan
- b. Menciptakan dan menjamin kelancaran operasional di kantor cabang dan melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan pegawai di kantor cabang induk dan BRI unit di wilayah kerjanya untuk meningkatkan kualitasnya seperti fungsi marketing, dan operasional.
- c. Mengembangkan bisnis perkreditan di kantor cabang guna memperoleh keuntungan yang optimal
- d. Mengawasi semua bahawannya dan unit-unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dan RKA yang telah ditetapkan.

#### **2. Manajer Pemasaran**

Tugas dan tanggung jawab

- a. Membantu pimpinan cabang dalam mempersiapkan RKA dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan
- b. Menyusun rencana pemasaran tahunan (RPT) yang menjadi tanggung

jawabnya agar sesuai dengan RKA, PS dan KND kantor cabang.

- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit direalisasi sampai dengan kredit dilunasi.
- d. Memberikan rekomendasi atas usulan atau putusan kredit (PTK) yang dibuat AO

### 3. Account Officer Commercial

- a. Membuat RPT perkreditan atas sektor yang dikelolanya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi kantor cabang
- d. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit sebelum permohonan kredit di proses dalam rangka mengamankan kepentingan bank

### 4. AO Konsumer

- a. Membuat RPT kretop/kresun dan bertanggungjawab atas pencapaiannya dalam rangka mencapai RKA yang telah ditetapkan
- b. Melakukan analisis atau identifikasi terhadap debitur potensial secara selektif (instansi) untuk mengukur tingkat resiko kredit secara instasional guna menciptakan portofolio kredit yang sehat dan menguntungkan
- c. Meneliti kelengkapan dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan

pada kreta/kresun, seperti keaslian surat keputusan, daftar gaji dan lain-lain untuk mengurangi risiko kredit

5. AO program

- a. Membuat RPT atas kredit program dan bertanggung jawab atas ketercapaiannya guna memenuhi target RKA yang telah ditetapkan
- b. Mengelola account yang sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi kantor cabang
- c. Mengusahakan agar pelaksanaan kredit program pemerintah berjalan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk mensukseskan program pemerintah.
- d. Mengawasi pengembalian kredit program pemerintah secara administratif maupun uji petik yang telah dibayar oleh petani atau kelompok tani KUD dalam rangka menjamin penggunaan kredit yang sesuai dengan ketentuannya.

6. Supervisor ADK

- a. Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit di kantor cabang
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PTK terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit
- c. Memastikan bahwa instruksi pencairan kredit telah dibuat dengan ketentuan yang berlaku.

7. Supervisor Pelayanan Intern

- a. Memastikan bahwa tugas-tugas personalia, logistik (termasuk surat berharga untuk kantor cabang dan keamanan di kantor cabang telah

dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Memperlihatkan register: aktiva tetap, penyusunan aktiva tetap, biaya-biaya inventaris kantor yang dibeli dengan biaya eksploitasi, kas port, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan
  - c. Mengadministrasikan semua jenis barang yang di kantor cabang dan menyiapkan perhitungan dan bukti pembukuannya
8. Supervisor Pelayanan Kas
- a. Menyiapkan kuitansi tambahan kas supervisor dan ATM serta menerima uang dari AMO
  - b. Menyetujui tambahan kas awal teller, membuku dan mendistribusikan uangnya kepada teller
  - c. Memeliharakerjakan register kas induk
  - d. Menerima kwitansi tambahan kas atau setoran kas beserta uangnya dari kantor cabang pembantu dan BNI yang diterima dari kantor cabang.
  - e. Meneliti kebasahan bukti kas yang diterima
9. Ass. Manajer Operasional (AMO)
- a. Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi (kecuali ATM) dalam kurun waktu setelah close system pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya guna menjamin tidak terjadi transaksi illegal.
  - b. Melaksanakan tambahan kas awal hari/selama jam pelayanan kas bagi teller dan ATM serta menerima setoran kas dan teller untuk menjamin pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik dan keamanan kas

- c. Mengaktifkan rekening pinjaman dan simpanan agar pembukuan rekening tersebut dipastikan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan

#### 10. Fungsi Sekretaris/SDM

- a. Mengagenda surat-surat keluar dan surat-surat masuk dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Mengatur agenda kerja pimpinan cabang
- c. Memeliharakerjakan file kepegawaian secara tertib
- d. Mengirim surat/berita penting melalui lainnya yang diberikan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

#### 11. Fungsi UPN/customer service

- a. Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk BNI guna menunjang pemasaran produk BNI
- b. Memberikan informasi saldo simpanan/transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- c. Membantu nasabah dalam mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan (Britama, Simpedes, Tabungan Haji), giro dan deposito.
- d. Menyelesaikan laporan-laporan yang diperlukan pelayanan ONH
- e. Menerima dan menginventarisasikan keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang
- f. Memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan (seperti mengantarkan atau menjemput uang ditempat tinggal/usaha nasabah guna memuaskan nasabah)

- g. Melayani permintaan salinan rekening koran bagi nasabah
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
- i. Melakukan transfer masuk yang diterima melalui telepon dan mentransfer invalid ke dalam ortomail.

#### 12. Teller

- a. Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik dan memuaskan
- b. Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya
- c. Memastikan membayar uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan kantor cabang
- d. Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima

#### 13. Fungsi Logistik

- a. Memenuhi kebutuhan logistik/kepada pekerja sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran pelayanan kantor cabang
- b. Mengadministrasikan semua aktiva kantor cabang dengan tertib dan benar untuk mengamankan aset bank
- c. Memelihara kerjakan register logistik

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Usaha Perkreditan BRI Cabang Soppeng**

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wiraatmadja. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia Memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Nama Kantor dan Alamat Kantor BRI Cabang Tondano, Pada saat ini BRI memiliki beberapa kantor yang beroperasi, di Kabupaten Minahasa mempunyai 1 Kantor BRI Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu, 6 Kantor Unit. Lokasi penelitian dilakukan di BRI Kantor Cabang Soppeng.

#### **1. Jenis-jenis kredit usaha tani**

Dalam bidang perkreditan, BRI memiliki jenis kredit khusus pembiayaan di sektor pertanian, sebagai salah satu produk BRI untuk nasabahnya. Jenis kredit BRI yaitu kredit usaha dan kredit program. Kredit usaha terbagi atas dua jenis kredit yaitu kredit menengah dan kredit ritel komersial. Kredit program terbagi

atas kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) dan kredit program kemitraan bina lingkungan (Kredit PKBL). Pembiayaan yang dilakukan oleh BRI pada sektor pertanian melalui kredit usaha rakyat (KUR Mikro) secara umum disalurkan khusus petani serta melalui kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) pembiayaan yang dilakukan terhadap sektor pertanian. KUR Mikro yaitu kredit yang disalurkan dengan plafon sampai Rp. 20.000.000 per debitur. Kredit ini dimanfaatkan untuk membiayai semua usaha produktif yang feasible tapi belum bankable. Usaha di sektor pertanian termasuk usaha yang produktif karena dapat menghasilkan output, oleh sebab itu untuk dapat menyalurkan dana ke sektor pertanian BRI memiliki kredit program khusus sektor pertanian yaitu KKP-E yang adalah sebagian dari KUR-Mikro dari BRI. Untuk menyalurkan kredit ini bank harus memiliki pedoman khusus dalam penyaluran dana ke sektor pertanian, mengingat salah satu kendala dalam penyaluran dana di karenakan kurang cocoknya usaha di sektor pertanian dengan usaha yang ada di sektor perbankan. Beberapa bank besar tidak memiliki pengalaman dalam menyalurkan kredit mikro dan juga pengalaman dan trauma beberapa bank menghadapi kenyataan kredit bermasalah pada waktu pengembalian kredit.

## 2. Jumlah kredit usaha tani

Pembiayaan BRI melalui KUR-Mikro dan KKP-E untuk sektor pertanian di Kabupaten Soppeng, dapat dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan dari unit



BRI yang menyalurkan dana pada sektor pertanian. Unit BRI yang menyalurkan kredit yaitu unit BRI soppeng.

Tabel 5.1 Jumlah Pembiayaan Unit BRI Soppeng Pada KUT-Mikro dan KKP-E.

Jenis Kredit	Jumlah Pembiayaan (jutaan Rp)		Perkembangan %			Jenis Kredit	Jumlah Pembiayaan (jutaan Rp)		Perkembangan %		
	2011	2012	2013	2011-2012	2012-2013		2014	2015	2016	2011-2013	2012-2014
<b>KUT-Mikro</b>	581	2,132	3,599	27	59	<b>KUT-Mikro</b>	334.9	20	-295	-609.8	-924.7
<b>KKP-E</b>	170	396	1,048	42	37	<b>KKP-E</b>	152.6	90.6	29	-33.4	-95.4

Sumber: BRI Cabang Soppeng, 2016

Dari data diatas jumlah pembiayaan unit BRI Soppeng pada KUT-Mikro mengalami peningkatan. Jumlah pembiayaan pada tahun 2011 sebesar Rp.581,000,000 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.132,000 jumlah pembiayaan KUT-Mikro lebih besar dibandingkan tahun 2011 yang mengalami peningkatan sebesar 27% kemudian pada tahun 2013 lebih meningkat menjadi Rp. 3.599,000 atau meningkatkan sebesar 59%. Jumlah pembiayaan unit BRI Tondano pada KKP-E juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun . pada tahun 2011 sebesar Rp. 170,000,000 dan pada tahun 2012 jumlah pembiayaan lebih besar dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 396,000,000 atau meningkat 42% kemudian pada tahun 2013 lebih besar dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 1.048,000,000 atau meningkat 37%.

### 3. Dasar – Dasar Penyaluran Kredit usaha Tani (KUT)

Untuk menentukan apakah permohonan kredit itu dapat diterima sebagai debitur atau tidak diperlukan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon debitur yaitu yang lebih dikenal dengan faktor 5 C ( The Five C'S of Credit).

a. *Charakter* (watak)

Penilaian karakter atau watak baik perusahaan perseorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi baik dari luar al. informasi bank, daftar kredit macet, pemasok pembeli langganan, masyarakat sekitarnya dan lain-lain.

b. *Capacity* (kemampuan)

Merupakan kemampuan calon debitur sebelum mendapatkan fasilitas kredit dari bank apakah yang bersangkutan sudah mampu dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya dan kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang akan diberikan yang dapat dihubungkan dengan tingkat kemampuan dan usaha untuk membayar kembali kreditnya yaitu pokok pengambilan ditambah dengan bunga dikemudian hari.

c. *Capital* (modal)

Modal yang telah dimiliki oleh calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan sampai seberapa besar fasilitas kredit bank yang dapat diberikan sebagai tambahan untuk dijadikan sebagai modal.

d. *Condition* (kondisi)

Merupakan jaminan tambahan baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang secara yuridis dapat diikat sebagai jaminan.

Dari hasil penelitian penulis mengenai data-data yang berhubungan dengan sistim pengendalian intern atas penyaluran kredit pada BRI cabang Soppeng,

penulis memperoleh informasi dan gambaran tentang penerapan sistem pengendalian atas penyaluran kredit tersebut. Selanjutnya penulis mengadakan analisa data-data yang ada pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Soppeng, maka penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah Kredit Usaha Tani (KUT) yang tersalur untuk membantu para petani pada periode tahun 2012 – 2016

Tabel 5.2 Jumlah Kredit Usaha Tani (KUT) Yang Disalurkan Untuk Periode Tahun 2012 - 2016

Tahun	Penyaluran Kredit (Rp)	Perubahan (Rp)	Peningkatan (%)
2012	290.000.000	0	0,00
2013	300.000.000	10.000.000	3,45
2014	350.000.000	50.000.000	16,67
2015	380.000.000	30.000.000	8,57
2016	400.000.000	20.000.000	5,26

Sumber : PT Bank BRI Tbk Cabang Soppeng (Data diolah kembali)

Dengan melihat tabel diatas, maka diketahui bahwa perkembangan penyaluran kredit usaha tani pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 290.000.000,- dan pada tahun 2013 jumlah kredit sebesar Rp. 300.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 3,45 % dari kredit tahun 2003, sedangkan untuk kredit tahun 2004 adalah sebanyak Rp. 350.000.000,- atau terjadi kenaikan sebesar 16,67 % dari kredit tahun 2013, kemudian kredit tahun 2015 yaitu sebesar Rp.380.000.000,- atau mengalami kenaikan penyaluran sebesar 8,57 % dari tahun 2015 dan terakhir tahun 2016 penyaluran kredit sebesar Rp.400.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 5,26% dari pada tahun 2005.

Berikut ini adalah data pelunasan kredit yang penulis peroleh dai PT Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng mulai tahun 2012 hingga 2016 sebagai beriku:

Tabel 5.3 Pelunasan Kredit Usaha Tani (KUT) dan Jumlah Nasabah

No Urt	Musim Tanam (MT)	Penyaluran Kredit (Rp)	Jumlah Nasabah (Orang)	Sisa Pinjaman (Rp)	Ket.
1	2012	290.000.000	93	-	Lunas
2	2013	300.000.000	119	-	Lunas
3	2014	350.000.000	122	-	Lunas
4	2015	380.000.000	138	11.500.000	-
5	2016	400.000.000	192	27.950.000	-
	Jumlah	1.720.000.000	664	39.450.000	-

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Soppeng

Berdasarkan tabel 5.3 bahwa baik jumlah kredit maupun jumlah nasabah tiap tahun mengalami peningkatan pendapatan bagi yang menggunakan fasilitas KUT melalui PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Soppeng, yaitu mulai tahun 2012 jumlah anggota meningkat hingga 2016, sehingga BRI adakalanya kewalahan meladeni nasabah bila musim tanam, hanya saja persyaratan untuk memperoleh kredit harus terpenuhi persyaratan.

Pendapatan petani dapat meningkat karena berkat kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Soppeng, sehingga kian hari tambah meningkat nasabahnya, maka hipotesis yang diajukan dapat diterima atau terbukti.

## **B. Sistem dan Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Tani**

### **1. Prosedur Penyaluran Kredit**

Mekanisme Penyaluran KUT dimulai dengan adanya keputusan sidang kabinet terbatas diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2007 bertempat dikantor kementerian negara Koprasi dan Petani , pemerintah akan membantu mendorong peningkatan akses pelaku Petani dan Koperasi kepada kredit pembiayaan dari

perbankan melalui peningkatan kapasitas usaha penjamin Kredit Usaha Rakyat yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh instruksi presiden No.5 Tahun 2008 tentang fokus Program Ekonomi untuk menjamin percepatan pelaksanaan serta penyaluran KUT.

Kredit yang dikucurkan oleh bank kepada calon debitur/debiturnya haruslah melalui serangkaian langkah-langkah ataupun proses yang dimulai sejak penerimaan permohonan kredit dari calon nasabah sampai akhirnya dikucurkan kepada calon debitur/debitur. Tahapan atau proses inilah yang disebut dengan prosedur penyaluran kredit.

Prosedur Penyaluran Kredit usaha tani BRI cabang Soppeng harus melalui tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam pemberian kredit ini dikenal dengan prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam prakteknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif. 43 Menurut bank Indonesia pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dan bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit

perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan bank Indonesia. Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang kepada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk didalam pemberian kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengkreditan Bank bagi bank BRI batas maksimal pemberian kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.

a. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengkreditan agar pemberi kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank BRI Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan pengkreditan bank dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan 44 komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit;

5. Pengawasan kredit;
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelola perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.

b. Prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dalam peraturan Bank BRI cabang Soppeng

1. Mengisi formulir aplikasi kredit
2. Melengkapi persyaratan
3. Data historis perusahaan
4. Data proyeksi
5. Data jaminan
6. Mengecek apakah formulir permohonan dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap
7. Penyerahan dokumen ke bank
8. Konfirmasi data/ dokumen
9. Analisa kelayakan kredit dengan menggunakan 5C 45
10. Analisis keuangan
11. Persetujuan kredit

### **C. Sistem Pengawasan Intern Penyaluran Kredit Usaha Tani di BRI Cabang Soppeng**

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa penyaluran kredit usaha tani pasti ada kredit yang menunggak dan kredit diragukan, sehingga PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng sudah diberikan kebijaksanaan dalam pengawasan intern yang tertuang dalam sop yaitu :

#### **a. Analisa Pengawasan Intern**

Kebijaksanaan pengawasan intern untuk mengidentifikasi kembali yang menjadi jaminan pada bank saat kredit diambil, ternyata mengalami hambatan dalam pengembaliannya. Bagian kredit meninjau kembali jaminan atau dievaluasi kegiatan, apakah kegiatan masih aktif atau tidak.

#### **b. Kebijakan Pengawasan Intern**

Kebijaksanaan pengawasan bila kredit mengalami hambatan pengembaliannya, sebagai berikut :

- 1) Diberikan kebijaksanaan untuk melunasi utangnya dengan syarat memberikan kelonggaran pembayaran.
- 2) Membuat perjanjian ulang berapa sebenarnya kesanggupan dia bayar tiap bulan.
- 3) Langkah-langkah untuk mengantisipasi kredit macet
- 4) Analisa Pengawasan intern
- 5) Memberikan perhatian pertama atau pemanggilan untuk dikonsultasikan terlambatan pembayaran



- 6) Memberikan pemanggilan kedua bila pemanggilan pertama tidak berhasil.
- 7) Memberikan lampu merah bila kebijaksanaan yang ditempuh tidak berhasil.

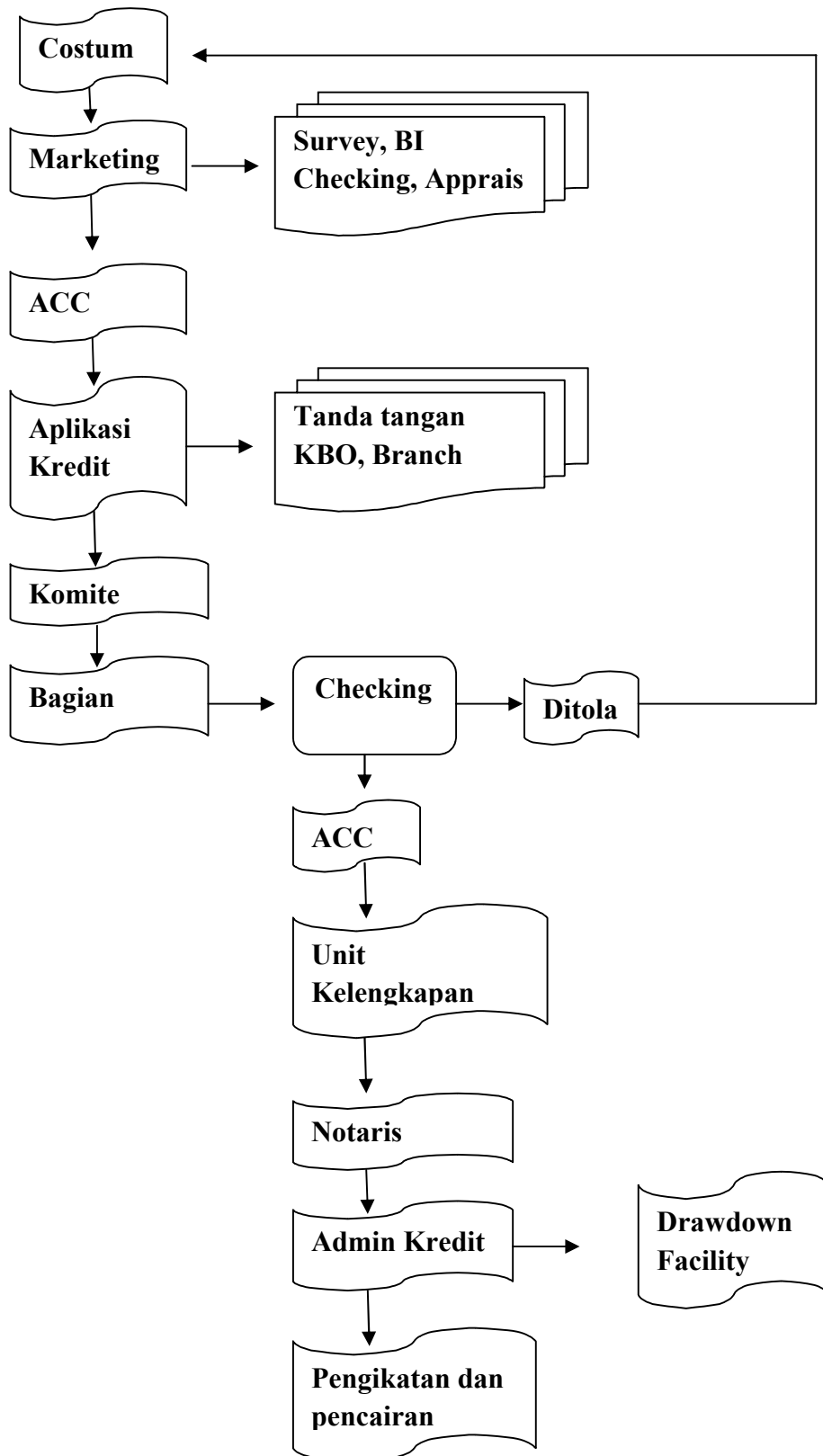
Dengan demikian, BRI cabang Soppeng dapat memahami perilaku nasabah pada dasarnya, karena BRI berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabah sangat tergantung dengan kepuasan layanan yang ada di BRI cabang Soppeng. Dengan memahami perilaku nasabah pihak manajemen pelayanan dapat menyusun strategi dan program yang tepat dalam memanfaatkan peluang yang ada.

### **1. Sistem Pengawasan Intern Penyaluran Kredit Usaha Tani**

Dari uraian bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kredit merupakan aset bank yang didalamnya terkandung resiko yang sangat besar, disamping itu juga kredit merupakan unsur yang sangat penting bagi operasional perbankan karena pendapatan bank sangat tinggi dari kredit. Oleh karena itu diupayakan semaksimal mungkin tersedia sarana yang lengkap, pengendalian internal yang efektif, dan profesionalisme manajemen dalam mengelola kredit. Keberhasilan perkreditan suatu bank tidak dapat lepas dari tata cara pelaksanaan prosedur kredit yang baik serta adanya pengendalian intern yang memadai untuk meminimalkan resiko kredit macet yang mungkin timbul dikemudian hari, sekaligus menghasilkan kredit yang sehat dan produktif. Pemberian kredit dalam hal ini adalah Kredit Usaha yang merupakan kredit bagi usaha mikro, kecil, menengah yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan, sehingga BRI cabang Soppeng memberikan

kredit kepada calon debitur tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuannya mengembangkan usaha.

Sistem pengendalian intern penyaluran kresit usaha tani BRI Cabang Soppeng didasarkan pada SOP yang dilengkapi dengan alur kerja dari sistem tersebut melalui suatu flowchart pada halaman berikut:



Gambar 5.1 Flowchart Penyaluran Kredit

## **Penjelasan Flowchart**

### **1. Tahap Permohonan Kredit**

Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis, dan hal itu berlaku baik pada kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.

### **2. Tahap Analisa Kredit**

Setelah permohonan kredit disetujui maka proses selanjutnya adalah analisa kredit yang dilakukan oleh petugas analisa yang ditunjuk untuk menganalisa permohonan kredit dari calon debitur .

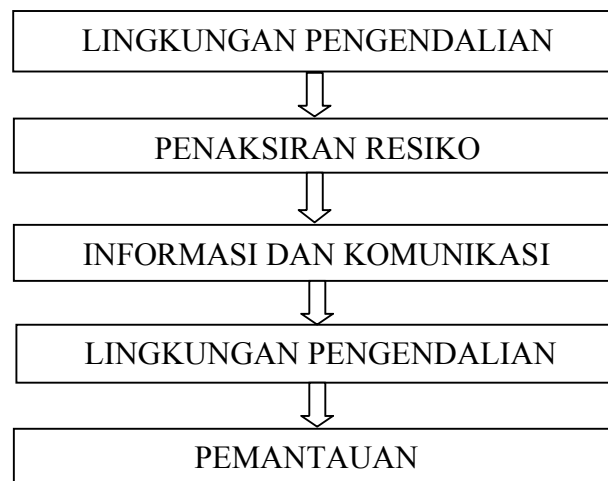
### **3. Tahap Persetujuan Kredit**

Setelah melalui proses analisa kredit, maka dilanjutkan pada proses persetujuan kredit, pada proses ini calon debitur akan memperoleh keputusan yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit modal kerja sesuai dengan permohonan yang disetujui.

### **4. Tahap Pencairan Kredit**

Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit yang telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Sebelum pencairan kredit dilakukan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Di dalam Sistem Pengendalian Internal penyaluran kredit usaha tani terdapat 5 komponen/unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:



Gambar 5.2 Siklus Unsur SPI ( Sistem Pengendalian Intern):

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*), suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan (*control consciousness*) dari seluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur. Penaksiran Resiko yaitu pengidentifikasian entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
- b. Penaksiran resiko (*risk assessment*), adalah proses mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana mengelola/mengendalikannya
- c. Informasi dan komunikasi (*information and communication*), dua elemen yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. Manajemen harus membangun system informasi yang efektif dan tepat waktu. Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansi yang terdiri

dari cara- cara dan perekaman (records) guna mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangka membuat pertanggung jawaban (akuntabilitas) aset dan utang-utang perusahaan.

d. Pemantauan merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Kelima komponen yang terdapat pada sistem pengendalian intern sangat berkaitan terhadap jalannya prosedur pemberian Kredit Usaha yang terdapat pada BRI cabang Soppeng. Berikut pembahasan atas setiap sistem pengendalian intern pada BRI cabang Soppeng sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian, dimana manajemen dan karyawan melaksanakan kegiatannya dan menunaikan tanggung jawabnya untuk mengendalikan organisasi. Lingkungan pengendalian yang bertujuan untuk peningkatan disiplin kerja dan peningkatan struktur organisasi sudah terlihat dengan adanya pembagian jabatan dan tugas sehingga tidak terlihat adanya rangkap jabatan diperusahaan yang dilakukan oleh setiap karyawan yang bertujuan untuk mempermudah segala pekerjaan yang dikerjakan, tetapi terkadang juga sering terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh karyawan meskipun sudah ada pembagian tugas dan jabatan. Disamping itu telah terlihat penempatan karyawan yang sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang bertujuan agar kinerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu dengan adanya sistem pelaporan yang diterima berdasarkan pertriwulan mengakibatkan terjadinya kelalaian dari pihak

bank khususnya bagian kredit untuk memeriksa jumlah nasabah yang belum melunasi kreditnya pada bulan kedua dan ketiga

- 2) Penaksiran Resiko, mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang timbul dari perubahan keadaan dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan kredit yang diberikan pada nasabah serta pengaruh terhadap bank yang bersangkutan. Penaksiran resiko pada BRI cabang Soppeng yang berhubungan dengan kredit bermasalah atau kredit macet dimana kemungkinan sebagai nasabah yang tidak dapat melunasi kreditnya.
- 3) Informasi dan Komunikasi, mencakup sistem akuntansi yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu usaha, serta menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan utang usaha tersebut.
- 4) Aktivitas Pengendalian, kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan bank. Agar aktivitas pengendalian ini berjalan dengan baik maka pihak BRI cabang Soppeng juga telah membuat struktur organisasi terutama dalam bidang perkreditannya, dapat dilihat bahwa terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tepat bagi setiap karyawan dalam perusahaan, sehingga masing-masing bagian mengetahui dengan jelas apa tugas mereka dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab.
- 5) Pemantauan, proses penilaian sistem pengendalian intern sepanjang waktu, pemantauan sistem pengendalian intern, khususnya dibidang perkreditan

pada BRI cabang Soppeng dilaksanakan oleh bagian analisis kredit dengan melakukan pemantauan yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan maksimalnya 12 kali dalam satu tahun. Dalam pemantauan ini pihak bank sebelum melakukan pemantauan memberitahukan informasi kepada nasabah. Fokus utama pemantauan yang dilakukan oleh analis kredit adalah pada aktivitas sehari-hari yang terjadi dalam usahanya. Dalam hal ini sebaiknya pihak analis kredit dalam melakukan pemantauan tidak perlu memberitahukan kepada debitur, karena bisa saja debitur atau nasabah menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh analis kredit dengan informasi palsu atau tidak benar mengenai keadaannya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemberian kredit khususnya pemberian kredit pada usaha tani, maka Bank BRI menetapkan sistem management perkreditan yang diperlakukan khusus untuk pengelolaan debitur KUR. Sistem pengelolaan dibidang perekonomian saat ini maupun dimasa yang akan datang dan diharapkan pengelolaan Kredit Usaha Tani (KUT) dapat berjalan lancar, efisien, efektif dan selaras dan teknologis.

#### **D. Standar Operasional Prosedur BRI cabang Soppeng**

Setelah pencairan kredit Usaha Tani (KUR), pihak BRI tidak lepas tangan begitu saja, pihak bank tetap melakukan pemantauan (monitoring) dan pembinaan kepada nasabah KUR. Tujuan dilakukan pengawasan kredit adalah agar program pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa berjalan sesuai prosedur dan dapat berjalan efektif serta mampu mencapai target tahunan yang telah ditetapkan saat perencanaan tahunan. Pengawasan lebih banyak dilakukan oleh kepala Unit dan



dibantu oleh masing-masing jabatan yang berkaitan dengan program pemberian Kredit Usaha Tani (KUR).

Pengawasan kredit dilakukan selama 3 (tiga) minggu pertama setelah pencairan kredit dan selanjutnya monitoring dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali. Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh nasabah. Monitoring juga dilakukan untuk mencari solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh nasabah. Hasil Monitoring ini dicatat dalam laporan Keuangan Nasabah (LKN).

Manfaat SOP sistem pengawasan dan pengendalian intern penyaluran ktedit yaitu sebagai berikut:

1. Memastikan perusahaan memiliki proses konstan yang memenuhi standar dan semua personil mengenal proses tersebut.
2. Adanya SOP, proses akan selalu ditinjau dan diperbaharui berdasarkan dasar yang sudah ada.
3. SOP dapat membantu dalam pelatihan personil baru sebagai sumber refrensi bagi pelatih personil.
4. SOP dapat membantu dalam melakukan evaluasi terhadap performansi personil dan proses yang dilakukan.

### **E. Analisa Pembahasan**

Penelitian membahas tentang sistem pengendalian intern atas penyaluran kredit dengan berfokus pada kredit Usaha Tani (KUT) yang diselenggarakan oleh Bank BRI cabang Soppeng, dimana jumlah nasabah yang mendapatkan KUT selama tahun penelitian yaitu tahun 2012 – 2016 cukup besar yaitu mencapai jumlah nasabah 664 dengan jumlah kredit sebesar Rp. 39.450.000.

Mengingat besarnya dana yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Soppeng, maka diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang baik yang dapat menjamin keamanan dan kelancaran sistem penyaluran kredit usaha tani khususnya di BRI Cabang Soppeng. Dari data yang penulis kumpulkan diperoleh informasi bahwa PT Bank BRI Cab. Soppeng sudah menerapkan sistem pengendalian intern atas penyaluran kredit. Hal ini tertuang dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Bank BRI Cabang Soppeng.

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian kredit yang diselenggarakan oleh BRI Cabang Soppeng telah sesuai dengan SOP yang ada dan telah dilaksanakan dengan baik dan cukup memadai. Hal ini terambar dengan adanya sistem pengendalian intern tersebut terjadi perkembangan penyaluran kredit, secara keseluruhan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Soppeng. Selain itu dapat dilihat pula adanya peningkatan jumlah nasabah atas kredit usaha tani tersebut..

Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada BRI cabang Soppeng terutama pada program penyaluran kredit usaha tani pada dasarnya menjalankan

prinsip-prinsip atau unsur-unsur pengendalian intern yang baik yang meliputi 4 unsur yaitu :

- a). lingkungan pengendalian adalah elemen pertama dari struktur pengendalian intern versi COSO. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut.
- b). penaksiran resiko adalah proses evaluasi efektivitas desain dan operasi kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan.
- c). aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisma yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri.
- d). pemantauan adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolahpotensial, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, sejauh mana kendala dan hambatan ditemui, dan bagaimana upaya-upaya yang sudah dan harus ditempuh untuk mengatasi kendala dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan program dalam sekolah potensial.

Pekembangan kredit usaha tani pada BRI Cab Soppeng yang sangat meningkat baik dari segi jumlah nasabah maupun jumlah kredit secara keseluruhan sebagai dampak dari efektifnya sistim pengawasan dan pengendalian intern. Jumlah tersebut sangat signifikan yaitu mencapai sebesar Rp. 400.000.000,- dengan tingkat prosentase sebesar 5,26%. Dengan demikian maka

dapat dikatakan bahwa sistim pengawasan dan pengendalian Intern yang dilaksanakan oelh Bank BRI Cab. Soppeng khususnya Kredit Usaha Tani (KUT) sudah cukup Efektif.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A Kesimpulan**

Berdasarkan uraian ada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan perlu dikemukakan sebagai berikut :

1. Prosedur pengendalian internal dalam pemberian kredit telah memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya prinsip 5C dengan cukup baik sebelum dicairkan suatu kredit.
2. Penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Soppeng selama 5 lima tahun yaitu mulai tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan tiap tahunnya sebagai dampak dari penerapan sistim pengawasan dan pengendalian Intern yang baik.
3. Perkembangan penarikan Kredit Usaha Kecil (KUT) tersebut, karena prosedur dan penyalurannya cukup efektif dan efisien, sehingga masyarakat membutuhkan dapat melengkapi sesuai persyaratan untuk memperoleh KUT, maka hipotesis penelitian ini dapat diterima (terbukti).
4. Sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit cepat aman pada PT Bank BRI cabang Soppeng dapat dilihat dari efektifitas penerapan sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan oleh BRI cabang Soppeng yang secara umum telah dinilai efektif. Dilihat dari struktur organisasi yang telah memadai, adanya sistem wewenang yang jelas antar masing-masing dan prosedur yang dipetuhi oleh karyawan .

## **B. Saran**

Adapun sasan-saran yang akan dikemukakan pada PT Bank Indonesia Indonesia Tbk Cabang Soppeng sebagai berikut :

1. Sebaiknya bank lebih meningkatkan pengendalian internal dalam pemberian kredit agar dikemudian hari tidak lagi terdapat kredit bermasalah atau macet, meskipun dengan jumlah yang kecil atau sangat rendah yang tidak akan mengakibatkan kerugian yang besar.
2. Sebaiknya Bank lebih meningkatkan pengawasan terhadap kredit yang diberikan dan Bank juga lebih mendalam tentang kemauan dan kemampuan debitur membayar kredit sehingga tidak akan ada kredit bermasalah yang mengakibatkan Bank mengalami kendala-kendala dalam penagihan kredit bermasalah.
3. Tingkatkan kualitas pengendalian intern penyaluran kredit agar kredit bermasalah kredit macet dapat diminimalisasi sekecil mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Faisal. 1997, *Strategi dan Operasional Bank*, PT. Eresco, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2003, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Denda Wijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Firdaus, Rachmat dan Ariyanti, Maya. 2004, *Manaj Perkreditan Bank Umum*, ALFABETA, Bandung.
- Handoko, Hani.T. 1999, *Manajemen*, edisi kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, S, P. 2001. *Dasar – Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono, 2002. *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mulyadi,2001, *Akuntansi Manajemen*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Pudjo Muljono, Teguh. 1999, *Bank Auditing Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank*, Djambatan, Jakarta.
- Pudjo Muljono, Teguh. 2001. *Manajemen Perkreditan*, Bagi Bank Komersil, BPFE, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. 1998, *Manaj Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sulistyardhani, MG. 2000, *Kredit Rakyat*, Yayasan Kalika Budaya,, Yogyakarta.
- Tisnawati Sule, Ernie. 2005, *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta.

## RIWAYAT HIDUP



**YULYASRI WINARDIS**, dilahirkan pada tanggal 9 Juli 1995 Soppeng, Kabupaten Soppeng. Penulis adalah anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Sahrudin dan Hj. Salmare.

Riwayat pendidikan penulis yaitu masuk SD Negeri 191 Pacongkang, Kabupaten Soppeng tahun 2002 tamat pada tahun 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Liliraja tamat pada tahun 2010, kemudian lanjut di SMA Negeri 1 Liliraja dengan mengambil Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Di akhiri studi pada tahun 2018 suatu kebanggan bagi penulis mampu menyusun Skripsi dengan Judul **“ANALISIS PENGAWASAN INTERN DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA TANI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO) CABANG SAOPPENG”**